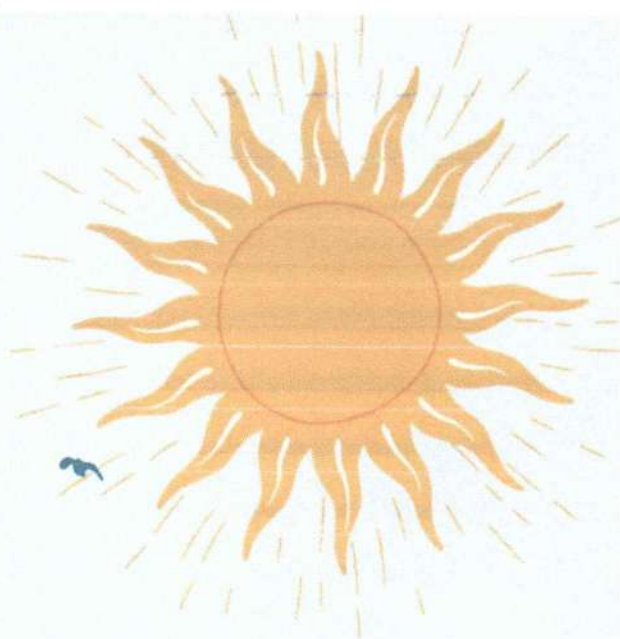




Laporan

Benturan Kepentingan

Semester I
Tahun 2025

Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jawa Tengah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dapat menyelesaikan **Laporan Evaluasi Internal Penanganan Benturan Kepentingan Semester I Tahun 2025.**

Laporan ini disusun sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2020 Pasal 13 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Diharapkan hasil evaluasi ini dapat memacu penanganan benturan kepentingan ke arah birokrasi yang menuju tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Demikian laporan ini disusun dengan harapan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Juli 2025
**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

ENDI FAIZ EFFENDI, S.Pi, M.A.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710909 199603 1 006

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Dasar Hukum 2

 C. Tujuan..... 2

 D. Tindak Lanjut Evaluasi Internal Semester II Tahun 2024 3

BAB II IMPLEMENTASI PENANGANAN BENTURAN

KEPENTINGAN 4

 A. Sosialisasi 4

 B. Identifikasi..... 4

 C. Pencegahan..... 4

 D. Penanganan Benturan Kepentingan 4

 E. Pelaporan 5

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN

KEPENTINGAN 6

 A. Sosialisasi 6

 B. Identifikasi..... 6

 C. Pencegahan..... 6

 D. Penanganan Benturan Kepentingan 6

 E. Pelaporan 7

BAB IV PENUTUP 8

 A. Simpulan..... 8

 B. Rencana Tindak Lanjut..... 8

LAMPIRAN 9

 Lampiran 1 : Nota Dinas, Daftar Hadir, dan Notulen Sosialisasi
 Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2025 10

 Lampiran 2 : Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan pada Dinas
 Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
 Tahun 2025..... 20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi memengaruhi atau dapat menyingkirkan profesionalitas seseorang dalam mengemban tugasnya. Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, keluarga, golongan, atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara menjadi tidak efektif dan tidak efisien.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses pembangunan nasional sangat diperlukan adanya penyelenggara negara yang berwibawa, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, efektif dan efisien karena setiap pegawai mempunyai peranan yang menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain disyaratkan untuk memiliki profesionalisme, setiap pegawai juga harus mempunyai peranan yang menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, memiliki sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada masyarakat, negara, dan bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas terhadap penanganan benturan kepentingan yang melibatkan pegawainya, meskipun dalam pelaksanaanya merupakan hal yang mana sulit dihindari. Hal ini penting untuk dibudayakan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu proses bagi pegawai yang mempunyai harkat, martabat dan citra yang tinggi dalam hubungan kerja dengan mitra dan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 523/5303/XI/2021 tanggal 08 November 2021 tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*) Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum disusunnya laporan evaluasi internal penanganan benturan kepentingan ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

C. Tujuan

Tujuan disusunnya laporan evaluasi internal penanganan benturan kepentingan ini antara lain:

1. Sebagai pedoman bagi pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah untuk mengenal, mencegah dan mengatasi situasi – situasi benturan kepentingan dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
2. Mengetahui terkait implementasi budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pegawai yang bersangkutan;

3. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
4. Menegakkan integritas;
5. Menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa;
6. Mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu dicegah terjadinya benturan kepentingan.

D. Tindak Lanjut Evaluasi Internal Semester II Tahun 2024

Berdasarkan Rencana Tindak Lanjut pada Laporan Evaluasi Internal Semester II Tahun 2024 telah terlaksana kegiatan sosialisasi “Membangun Budaya Anti Korupsi Jawa Tengah” pada tanggal 25 April 2025 yang diikuti secara daring dan luring oleh pejabat Eselon III dan IV serta perwakilan masing-masing Bidang, UPT, CDK. Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan update identifikasi benturan kepentingan melalui Form Penanganan Benturan Kepentingan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Upaya Tim Penanganan Benturan Kepentingan dengan secara berkala dan terus menerus melaksanakan Tindakan preventif atas benturan kepentingan yang senantiasa bersinggungan, membuahkan hasil positif tidak adanya pelaporan mengenai benturan kepentingan.

BAB II

IMPLEMENTASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Implementasi benturan kepentingan yang sudah dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

A. Sosialisasi

Sosialisasi “Membangun Budaya Anti Korupsi di Jawa Tengah” pada 25 April 2025 dilaksanakan secara hybrid yang diikuti oleh perwakilan masing-masing bidang, CDK, dan UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (**Lampiran 1**).

B. Identifikasi

Dalam rangka pengisian aplikasi SIBEKEN dan pemetaan potensi benturan kepentingan pada Semester I Tahun 2025, telah dilakukan identifikasi potensi benturan kepentingan yang dilakukan oleh Bidang, Cabang Dinas, dan UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. (**Lampiran 2**).

C. Pencegahan

Pencegahan yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi potensi benturan kepentingan tertuang dalam form identifikasi potensi benturan kepentingan yang dibuat oleh Bidang, Cabang Dinas, dan UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (**Lampiran 2**).

D. Penanganan Benturan Kepentingan

Beberapa penanganan yang sudah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Melaksanakan seluruh upaya pencegahan potensi benturan kepentingan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
2. Menerapkan Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 523/5305/4/2022 tanggal 09 November 2021;
3. Mengefektifkan Tim Penanganan Benturan Kepentingan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 523/5303/XI/2021 tanggal 08 November 2021 tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

E. Pelaporan

Pada Semester I Tahun 2025 tidak terdapat pelaporan mengenai benturan kepentingan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, yang ditunjukkan dalam matriks dibawah ini :

**Matriks Jumlah Pelaporan Benturan Kepentingan pada
Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
Periode Januari – Juni Tahun 2025**

No.	Sekretariat/Bidang/UPT	Jumlah Benturan Kepentingan
1	Sekretariat	0
2	Bidang Perikanan Tangkap	0
3	Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil	0
4	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	0
5	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	0
6	Cabang Dinas Kelautan Wil. Barat	0
7	Cabang Dinas Kelautan Wil. Timur	0
8	Cabang Dinas Kelautan Wil. Selatan	0
9	Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	0
10	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut	0
11	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan	0
12	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung	0
13	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari	0
14	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong	0
15	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	0
16	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	0
17	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	0
18	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	0
19	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending	0
20	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	0
21	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo	0
22	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	0
	JUMLAH TOTAL	0

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Evaluasi atas implementasi penanganan benturan kepentingan yang sudah dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

A. Sosialisasi

Dalam sosialisasi dijelaskan mengenai bentuk-bentuk Tindakan korupsi, fraud dan pengendalian yang dapat dilakukan sebagai langkah preventif dalam menghadapi perilaku koruptif. Selain itu dijelaskan pula mengenai nilai-nilai integritas yang dapat diterapkan oleh pegawai.

B. Identifikasi

Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan pemutakhiran pada tanggal 01 Juli 2025 di aplikasi SIBEKEN yang disesuaikan dengan substansi yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pasal 7 Ayat (3) (Lampiran 2).

C. Pencegahan

Pencegahan perlu disempurnakan dengan pemutakhiran hasil identifikasi sehingga lebih jelas dan lengkap serta akan mempermudah dalam implementasi pencegahan di lapangan sebagaimana lampiran 2.

D. Penanganan Benturan Kepentingan

Beberapa evaluasi penanganan benturan kepentingan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Semester I Tahun 2025, yaitu:

1. Masih ada pegawai yang belum memahami sepenuhnya mengenai benturan kepentingan, sehingga diperlukan sosialisasi mengenai Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 523/5305/4/2022 tanggal 09 November 2021 perlu agar pegawai memahami alur pelaporan benturan kepentingan dan bentuk-bentuk serta pencegahan menghadapi benturan kepentingan;
2. Personil dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Jawa Tengah Nomor 523/5303/XI/2021 tanggal 08 November 2021 untuk lebih memberikan pemahaman pada Bidang, UPT atau Cabang Dinas masing-masing mengenai potensi benturan kepentingan dan Langkah-langkah preventif dalam menghadapinya.

E. Pelaporan

Pada Semester I Tahun 2025 tidak ada laporan mengenai benturan kepentingan. Dalam hal ini yang terpenting adalah upaya pencegahan secara regular terus dilakukan, selain itu melakukan monitoring sehingga upaya pencegahan menimbulkan dampak positif dalam lingkungan kerja.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan Laporan Evaluasi Internal Penanganan Benturan Kepentingan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Semester I Tahun 2025, antara lain:

1. Sosialisasi terhadap seluruh pegawai telah dilaksanakan melalui pejabat serta perwakilan masing-masing bidang/UPT/CDK yang mengikuti sosialisasi;
2. Telah dilaksanakan pemutakhiran Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 pada tanggal 01 Juli 2025 pada aplikasi SIBEKEN;
3. Pada Semester I Tahun 2025 tidak ada laporan mengenai terjadinya benturan kepentingan.

B. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut terhadap Laporan Evaluasi Internal Penanganan Benturan Kepentingan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Semester I Tahun 2025, antara lain:

1. Sosialisasi mengenai benturan kepentingan dan langkah-langkah preventifnya dilakukan secara berkala terhadap seluruh pegawai;
2. Hasil identifikasi benturan kepentingan perlu lebih diupayakan kegiatan pencegahannya dan memaksimalkan upaya pendokumentasian penanganan secara lebih lengkap dan regular;
3. Tim Benturan Kepentingan lebih aktif dalam melaksanakan tugas dan meningkatkan kerjasama tim dalam penanganan benturan kepentingan.

LAMPIRAN 1



NOTA DINAS

Yth. : Terlampir
Dari : Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Tembusan : -
Tanggal : 22 April 2025
Nomor : 500.5/55/JFU.PROGRAM.DKP/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Undangan Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Periode Maret 2025

Dalam rangka pemantauan dan pengendalian kegiatan program/kegiatan APBD dan Pendapatan Asli Daerah TA 2025 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, akan dilaksanakan rapat Pengendalian Operasional Kegiatan secara hybrid pada :

- Hari/Tanggal : Jumat/25 April 2025
- Jam : 08.00 WIB s.d. selesai
- Tempat : **Luring:**
Ruang Command Centre
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Jawa Tengah
Daring (Zoom Meeting):
Link 539 510 4674
Passcode : DKP134

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Balai hadir secara luring, sedangkan Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai, Cabang Dinas Kelautan, Ketua Tim Pokja, Para Pejabat Eselon IV atau yang disetarakan hadir secara daring. Informasi lebih lanjut dapat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

menghubungi Sdr. Ary Setyawan (081321845390) dan Sdri. Humairoh H Hanifah (081390106004).

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Plt. Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Jawa Tengah,



Ir. Lilik Harnadi, M.Si., M.Sc
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 196902111994031004

1. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan
2. Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3. Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan
4. Kepala Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
5. Kepala Bidang Perikanan Tangkap
6. Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan
7. Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat
8. Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur
9. Kepala Balai Budidaya Ikan Air Payau Dan Laut
10. Kepala Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan
11. Kepala Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan
12. Kepala Pelabuhan Perikanan Nasional Tasikagung
13. Kepala Pelabuhan Perikanan Nasional Tegalsari
14. Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending
15. Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Bajcmulyo
16. Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan
17. Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang
18. Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak
19. Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Worokerto
20. Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor
21. Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Kariununjawa
22. Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Aserndoyong

JADWAL ACARA POK PERIODE MARET 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH
SEMARANG, 25 APRIL 2025

NO	JAM	ACARA	PEMATERI
1.	08.00 – 08.30	Registrasi	Panitia
2.	08.30 – 08.45	Pembukaan - Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya - Doa	Panitia
3.	08.45 – 10.00	Pembelajaran Anti Korupsi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
4.	10.00 – 11.30	Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Periode Maret 2025	Plt. Kepala Dinas
5.	11.30 – 11.40	Penutup	Panitia

Timestamp	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Jabatan	Bidang/UPT/CDK	No. HP/WA
4/25/2025 6:51:46	Ary Setyawan	Laki-laki	Pengadministrasi	Sekretariat	081321845390
4/25/2025 8:10:35	Amrullah Sigit	Laki-laki	Kepala pelabuhan	PPP Larangan	081326361377
4/25/2025 8:12:40	Nugroho WS Dandung	Laki-laki	Kasubbag TU	PPN Tegalsari	081390009738
4/25/2025 8:23:32	Dr. Jamaludin Malik, SPi, MSi	Laki-laki	Kepala PPP Wonokerto	PPP Wonokerto	085750387828
4/25/2025 8:33:34	Saifuddin	Laki-laki	Kepala PPP Karimunjawa	PPP Karimunjawa	081325341991
4/25/2025 8:34:37	Wartono,SH	Laki-laki	Kasubag Tata Usaha	UPT	085865080908
4/25/2025 8:36:58	Karunia Akbar, S.Kel, M.P.W.K, M.Eng	Laki-laki	Kasubag TU	PPP Wonokerto	081228506390
4/25/2025 8:38:39	ARIF ADY SETIAWAN	Laki-laki	Staf	PPP Logending	085643432015
4/25/2025 8:55:29	BENOVITA DWI SARASWATI	Perempuan	PELP	KP3K	087832241947
4/25/2025 8:55:38	Safiun Nizar	Laki-laki	Kasubbag Tata Usaha	PPP Karimunjawa	081290726774
4/25/2025 8:55:47	Dwi Rachmanto	Laki-laki	Kasi Konservasi	CDK Barat	082312116915
4/25/2025 8:55:53	Febriari Elis Tri Susanti	Perempuan	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	PPP Logending	081273220014
4/25/2025 8:55:56	R. Drianto Widiyatmoko	Laki-laki	Kalabuh	PPP Bajomulyo	081339818740
4/25/2025 8:57:10	Ir. DJATI PRAMONO	Laki-laki	Kepala UPT	PPP Loegending	+6281911489712
4/25/2025 8:57:13	HENDI KRISTIANA	Perempuan	P3T AHLI MUDA	PPN TASIKAGUNG	081225061557
4/25/2025 8:59:53	Setyo Handayani	Perempuan	Kepala Seksi Konservasi, Rehabilitasi dan Perizinan	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	085702301497
4/25/2025 9:01:14	Samuel Jati Jiwo Kusumo	Laki-laki	Kasubag Tu	CDK Wilayah BARAT	082134561441
4/25/2025 9:03:27	ARIYANTO	Laki-laki	Ka. TU	PPP Logending	+6285261690489
4/25/2025 9:12:55	Slamet Raharjo, SP	Laki-laki	Kepala Pelabuhan	PPP Asemdayong	085225510210
4/25/2025 9:12:57	trias elvi sm	Perempuan	pembina mutu hasil kelautan dan perikanan ahli muda	BPMHP Semarang	081325137572
4/25/2025 9:29:23	ACHMAD SAEFUS SJAHR	Laki-laki	Kepala	CDK Wilayah Timur	081325611270
4/25/2025 9:30:32	Dewi Parikesit, S.IP., MM	Perempuan	Ka Sub Bagian Tata Usaha	BIPKIL	081228495999

4/25/2025 9:32:39	Khairunnas	Laki-laki	Kasi Pengawasan	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	085747444862
4/25/2025 10:50:46	Aldise Kresna Dewi Tutianvia	Perempuan	P3T Ahli Muda	PPP Morodemak	08112705353
4/25/2025 10:55:14	Diah Agustine W	Perempuan	Staf PPP Wonokerto	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	085955118961
4/25/2025 21:35:05	Eny Dwi Lestari	Perempuan	Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan / Analis Akuakultur Ahli Muda	BBIAPL Kelas A	081770597895



ZAINUL ULUM, SP, ME, CFrA, FRMP

Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

- Koordinator Kelompok Penyuluh Antikorupsi APIP Jateng (KEPAK APIP 33)
- Ketua II Forum Komunitas Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas Jawa Tengah (KOMPAK API)
- Wakil Ketua Perkumpulan Forum Penyuluh Antikorupsi Nasional (PERPAKSINAS) Bidang Humas, Kerjasama dan IT
- Wakil Direktur Eksekutif DPW Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI) Jawa Tengah

Lisensi dan Sertifikasi:

- Asesor Manajemen Tata Kelola IT Pemerintah – Kemenkominfo-RI (2018)
- Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - LKPP-RI (2018)
- Penyuluh Anti Korupsi Muda - KPK-RI (2020)
- *Certified Forensic Auditor* (CFrA) – AAFI(2020)
- Auditor Ahli Madya – Pusbin JFA (2022)
- *Fraud Risk Management Professional* – LSP BPKP (2024)

- HP: 0656 4060 4922
- surel: zainulgrunge@gmail.com
- Twitter: [@zainulgrunge](https://twitter.com/zainulgrunge)
- Slideshare: <https://id.slideshare.net/zainul>



No.	Nama-Instansi	Uraian
		- Informasi dari BBH migas, rekom BBM subsidi harus terdaftar di DKP → butuh buku kapal, rekom BBM selama ini menggunakan pas kecil - Tidak memiliki buku kapal maka SPB tidak terbit → tidak bisa ditarik PAD, kinerja menurun
7.	Pak Kurnia Adi-PPP Morodemak	- Terdapat 42 kapal migrasi pusat kasusnya sama yaitu keberatan pemasangan VMS → namun one day fishing tidak memungkinkan tiap berangkat mengurus SLO dan SPB → dari syahbandar ijin pengurusan SPB mingguan namun dari pengawas tetap tiap har → 42 kapal mengajukan pindah ijin ke daerah - Kapal tidak memiliki SPB tidak bisa ditarik tambat labuh - Kerjasama dengan CDK terkait pengawasan di muara dekat pelabuhan (kelengkapan dokumen)
8.	Pak Kurniawan-Tangkap	- Permohonan 42 kapal migrasi ke daerah dipersilahkan - Buku kapal ada di DPMPSTP bisa cetak mandiri dan gratis → rekomendasi teknis selama ini di bidang perikanan tangkap namun tidak memungkiri terkait kondisi kapal pelabuhan lebih memahami
9.	Pak Jamal-PPP Wonokerto	- Harga di e-blangkon cenderung mahal (penyedia terbatas sehingga tidak ada kompetisi harga, terdapat fee) - Persyaratan rekom BBM dikembalikan regulasi dari BBH migas - Saat ini kapal kecil dibawah 5GT menggunakan (KTP, surat keterangan usaha/NIB, ukuran mesin-pas kecil dari KSOP) - Posisi brakewater saat pasang terendam air laut sehingga bila kapal sandar secara vertikal kapal akan berbenturan, maka sandar kapal kembali ke posisi horizontal - Aspirasi dari masyarakat : pengerukan kolam dan alur, pembangunan brakewater - Retribusi tambat labuh → kerjasama dengan TPI
10.	Pak Yunus-PPN Tasikagung	- Terkait retribusi tambat labuh berdasarkan kesepakatan bersama antara nelayan dengan kepala dinas (Pak Fendi), bila diberlakukan sesuai dengan regulasi dari KKP berpotensi akan ada penolakan dari nelayan - Rekom BBM berbagi tugas dengan DKP Rembang untuk kapal kecil
11.	Pak Saefus-CDK Timur	- Overhaul mesin kapal sudah selesai dan saat ini tahap pencairan - Anggaran patroli menjadi 10 kali dengan kondisi BBM lebih sedikit, strategi : pengawasan dilakukan di alur pelabuhan - Selama ini CDK mengeluarkan rekom pengolahan, namun kedepan CDK tidak diberikan kewenangan terkait perijinan. Harapannya CDK masih memiliki kewenangan perijinan - Usulan : pengadaan VMS sebesar 10 milyar sedangkan PNBP 200 milyar, pengembalian PNBP (kab/kota) salah satunya dengan pengadaan VMS
12.	Pak Rofik-Tangkap	- Kapal dibawah 30GT kembali ke daerah harus mengurus buku kapal (sipalka), SIUP dan SIPPI (OSS)
13.	Bu Dewi-Sekretaris	- Mohon cek kembali terkait pengisian SKP tw. 1 tahun 2025 → 30 april 2025 - Mohon segera mengaktifkan MFA - Tanggal mulai SPMT PPPK : 2 Mei 2025 → apel luar biasa, PPPK mabes mengikuti apel - PPPK yang diterima diluar mabes dimohon hadir ke DKP hari rabu, 30 Mei 2025
Sosialisasi Anti Korupsi		
1.	Pak Lilik-Plt Kadis	- Dilema : Harga e-blangkon lebih mahal dibanding harga toko. Bila beli harga lebih mahal berpotensi korupsi, bila beli lebih murah target e-blangkon berpotensi tidak terpenuhi
2.	Pak Zainul Ulum-Inspektorat	- Pengadaan secara elektronik sudah amanat undang-undang. PBJ harus mematuhi asas pengadaan yang telah ditetapkan, seperti asas efisien, efektif, transparan, terbuka dan bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Maka e-katalog untuk menghindari penggunaan belanja tidak efektif, efisien dan ekonomis - Jangan gara-gara lebih mahal dijadikan dasar tidak menggunakan e-katalog, gunakan tahapan negosiasi - Laporkan penyedia yang memberikan harga terlalu mahal di e-sikap → komunikasi dengan Biro APBJ (pengampu) - Memalsukan dokumen struk BBM masuk ranah pidana

No.	Nama-Instansi	Uraian
		- Keabsahan/kevalidan bukti transaksi tanggung jawab pelaksana kegiatan - Tiga dimensi membangun budaya anti korupsi : 1. Dimensi pemerintahan : eksekutif dan legislatif 2. Dimensi SDM : integritas dan kompetensi 3. Dimensi organisasi : infrastruktur dan implementasi - Integritas lebih penting dibanding kompetensi. Integritas : jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil - Kelemahan OPD : tidak pernah punya peta kompetensi - Di Jawa Tengah terdapat 297 desa antikorupsi yang diakui KPK - Kultur organisasi : budaya sadar risiko, transparansi, akuntabilitas, orientasi pelayanan, never ending learning - Kebocoran PAD lebih besar dari kebocoran belanja
3.	Bu Hermin-BPMHP	- Peralatan laboratorium dominan impor dan vendor terbatas, bagaimana tips supaya aman TANGGAPAN PAK ZAINUL - Perencanaan belanja spare part (barang) dan jasa (pemeliharaan) → RKBMD → disusun tidak sesuai kebutuhan - RKBMD mengacu pada pergub sarpras - Tahap sebelum jadi dokumen RKBMD yaitu tahap ranking prioritas - PL disertai reasoning masih memiliki risiko, biar aman barang diupload ke e-katalog

Notula,



HUMAIROH H. HANIFAH, SE.
NIP. 199601152022032006

DOKUMENTASI



LAMPIRAN 2

FORM BENTURAN KEPENTINGAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

No	Bidang/UPT/CDK	Sumber/Jenis Benturan Kepentingan*	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Detail/Bentuk Benturan Kepentingan	Penyebab	Pencegahan
1	Sekretariat - Subbag Keuangan	Gratifikasi	Verifikator Keuangan	Verifikator menerima imbalan dari pihak yang diperiksa sehingga memengaruhi keputusan verifikasi	kurangnya pemahaman tentang etika dan tanggung jawab dalam profesi	menerapkan kebijakan tegas terhadap gratifikasi di semua level organisasi
2	Sekretariat - Subbag Keuangan	Hubungan Afiliasi	Penyusun Laporan Keuangan	Penyusun Laporan Keuangan memodifikasi laporan keuangan untuk menutupi kesalahan atau kekurangan yang bisa merugikan pihak tertentu yang memiliki hubungan pribadi	lemahnya sistem pengendalian internal organisasi	meningkatkan sistem pengendalian internal organisasi
3	Sekretariat - Subbag Keuangan	Kelemahan Sistem Organisasi	Bendahara Gaji	Tunjangan anak tetap diberikan pada anak usia lebih dari 21 tahun	pegawai yang bersangkutan tidak menyampaikan perubahan data kepegawaian ke subbagian umum dan kepegawaian dan subbagian keuangan	meningkatkan koordinasi antara subbagian umum dan kepegawaian dengan sub bagian keuangan

4	Sekretariat - Subbag Umum dan Kepegawaian	Perangkapan Jabatan	Analisis Kepegawaian	Pegawai dapat merangkap lebih dari satu jabatan	kurangnya jumlah dan kualifikasi SDM sehingga diperlukan satu pegawai untuk mengerjakan tugas dan fungsi dari jabatan lain yang seharusnya tidak dapat dikerjakan oleh satu orang	melakukan evaluasi dalam perhitungan beban kinerja, mengirimkan usulan kebutuhan pegawai, dan menguatkan regulasi dan kepatuhan peraturan yang berlaku
5	Sekretariat - Subbag Program	Kepentingan Pribadi	Kepala Subbag Program dan Staf	Memberikan akses atau informasi istimewa kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya.	Penyalahgunaan wewenang atau kurangnya pemahaman dan penegakan prosedur yang berlaku.	Menghindari atau membatasi interaksi langsung dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan, menerapkan etika dan pencegahan benturan kepentingan
6	Sekretariat - Subbag Program	Gratifikasi	Kepala Subbag Program dan Staf	Menerima uang atau jasa tertentu dalam proses perencanaan anggaran	Belum memahami sepenuhnya mengenai benturan kepentingan dan tanggungjawab profesi	Bersikap profesional dan tegas, bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku
7	Bidang Perikanan Tangkap	Gratifikasi	Kepala Bidang, Ketua Pokja, Staf	Pemberian gratifikasi pada saat verifikasi calon penerima bantuan dengan harapan kelompok diloloskan menerima bantuan	Ketidakpahaman pemohon bantuan terkait peraturan gratifikasi	1. Sosialisasi terkait benturan kepentingan 2. Penguatan nilai-nilai integritas yang disisipkan dalam forum-forum 3. Dokumen Surat Perintah Tugas (SPT) Perjalanan Dinas tercantum perintah tidak menerima gratifikasi

8	Bidang Perikanan Tangkap	Gratifikasi	Kepala Bidang, Ketua Pokja, Staf	Proses Verifikasi Dokumen Teknis Layanan Perizinan Kapal Perikanan	Ketidakpahaman pelaku usaha dalam mengajukan perizinannya secara online dan banyaknya persyaratan pengajuan izin yang harus dipenuhi	1. Sosialisasi dan Gerai Perizinan Kapal Yang Menjadi Kewenangan Provinsi di Kab/Kota Jawa Tengah; 2. Pendampingan Pelaku Usaha di Kantor DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah; 3. Adanya Hotline Perizinan untuk Pengaduan/Konsultasi Pelaku Usaha	1. Proses pemilihan penyedia barang/jasa secara profesional sesuai prosedur 2. Proses pengadaan barang/jasa melalui e-Purchasing
9	Bidang Perikanan Tangkap	Hubungan Afiliasi	Pejabat Pembuat Komitmen dan PPTK	Pemilihan penyedia barang/jasa tidak sesuai spesifikasi	Adanya hubungan pertemanan	1. Proses pemilihan penyedia barang/jasa secara profesional sesuai prosedur 2. Proses pengadaan barang/jasa melalui e-Purchasing	1. Sosialisasi terkait benturan kepentingan 2. Penguatan nilai-nilai integritas yang disisipkan dalam forum-forum 3. Dokumen Surat Perintah Tugas (SPT) Perjalanan Dinas tercantum perintah tidak menerima gratifikasi
10	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	Gratifikasi	Kepala Bidang, Ketua Pokja, Staf	Pemberian gratifikasi pada saat verifikasi calon penerima bantuan dengan harapan kelompok diloloskan menerima bantuan	Ketidakpahaman pemohon bantuan terkait peraturan gratifikasi	1. Sosialisasi terkait benturan kepentingan 2. Penguatan nilai-nilai integritas yang disisipkan dalam forum-forum 3. Dokumen Surat Perintah Tugas (SPT) Perjalanan Dinas tercantum perintah tidak menerima gratifikasi	1. Proses pemilihan penyedia barang/jasa secara profesional sesuai prosedur 2. Proses pengadaan barang/jasa melalui e-Purchasing

11	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	Gratifikasi	Tim Audit	Pemberian gratifikasi pada saat penilaian sertifikasi perizinan (CBIB, CPIB, CPPIB, SKP) dengan harapan memperoleh nilai sertifikasi yang baik	Ketidakpahaman pemohon perizinan terkait peraturan gratifikasi	1. Sosialisasi terkait benturan kepentingan 2. Penguatan nilai-nilai integritas yang disisipkan dalam forum-forum 3. Dokumen Surat Perintah Tugas (SPT) Perjalanan Dinas tercantum perintah tidak menerima gratifikasi
12	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	Hubungan Afiliasi	Pejabat Pembuat Komitmen dan PPTK	Pemilihan penyedia barang/jasa tidak sesuai spesifikasi	Adanya hubungan pertemanan	1. Proses pemilihan penyedia barang/jasa secara profesional sesuai prosedur 2. Proses pengadaan barang/jasa melalui e-Purchasing
13	Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Gratifikasi	Kepala Bidang KP3K, PPTK, Staf	Pemberian gratifikasi kepada petugas saat melaksanakan penilaian, verifikasi maupun monitoring KKPR di lapangan dengan harapan terbangunnya hubungan baik	1. Ketidakpahaman terkait peraturan gratifikasi 2. Perilaku perusahaan/pelaku usaha yang ingin segera selesai dokumen KKPR tanpa melengkapi persyaratan yang diperlukan	1. Sosialisasi proses penyusunan dokumen KKPR 2. Sosialisasi terkait benturan kepentingan 3. Penguatan nilai-nilai integritas yang disisipkan dalam forum-forum 4. Evaluasi dan pengendalian internal 5. Dokumen Surat Perintah Tugas (SPT) Perjalanan Dinas tercantum perintah tidak menerima gratifikasi

14	Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Gratifikasi dan Hubungan Afiliasi	Kepala Bidang KP3K, PPTK, Staf	Pemberian gratifikasi saat pelaksanaan pemilihan penyedia barang jasa pelaksana kajian kawasan konservasi kepada kepala bidang, sub koordinator atau pokja PBJ	Penyedia mengharapkan menjadi pelaksana barang jasa akan tetapi ingin mempersingkat proses, tidak mau mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku	1. Bertindak secara profesional dengan mengutamakan integritas dan meminta pendampingan dari APIP 2. Proses pemilihan penyedia barang/jasa secara profesional dan sesuai prosedur melalui LPSE
15	Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Gratifikasi	Kepala Bidang KP3K, PPTK, Staf	Pemilihan rekanan dlm pengadaan hibah barang/jasa	rekanan yang menginginkan salah satu proyek hibah barang/jasa	Proses pemilihan penyedia barang/jasa secara profesional sesuai prosedur
16	Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Gratifikasi	Kepala Bidang KP3K, PPTK, Staf	penentuan kelompok penerima hibah	kelompok petambak garam yg melakukan gratifikasi agar mendapatkan bantuan	dilakukan verifikasi kelompok yg mengajukan proposal bantuan hibah bersama dg Dinas kabupaten terkait
17	Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Hubungan Afiliasi	Kepala Bidang KP3K, PPTK, Staf	penentuan kelompok penerima hibah	prioritas kelompok penerima hibah	dilakukan verifikasi anggota kelompok apakah ada yg berkerja sbg perangkat desa/pegawai negeri
18	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Gratifikasi	Kepala Bidang, Ketua Pokja, Staf	Pemberian gratifikasi pada saat verifikasi calon penerima bantuan/hibah Pokmaswas dengan harapan salah satu Pokmaswas diloloskan menerima bantuan	Ketidakpahaman pemohon bantuan/hibah terkait peraturan gratifikasi	1. Sosialisasi terkait benturan kepentingan 2. Penguatan nilai-nilai integritas yang disisipkan dalam forum-forum 3. Dokumen Surat Perintah Tugas (SPT) Perjalanan Dinas tercantum perintah tidak menerima gratifikasi

19	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Gratifikasi	Pengawas Perikanan dan Pengawas Kelautan	Pemberian gratifikasi pada saat pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan dengan harapan dapat meringankan teguran/sanksi yang diterima jika terdapat pelanggaran/ketidakpatuhan	- ketidaktahuan pemberi/pelaku usaha tentang regulasi gratifikasi - keinginan pemberi/pelaku usaha agar tidak diberikan sanksi jika melanggar - kurangnya integritas petugas	1. Sosialisasi terkait benturan kepentingan 2. Penguatan nilai-nilai integritas yang disisipkan dalam forum-forum 3. Dokumen Surat Perintah Tugas (SPT) Perjalanan Dinas tercantum perintah tidak menerima gratifikasi
20	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Hubungan Afiliasi	Pejabat Pembuat Komitmen dan PPTK	Pemilihan penyedia barang/jasa tidak sesuai spesifikasi	Adanya hubungan pertemanan	1. Proses pemilihan penyedia barang/jasa secara profesional sesuai prosedur 2. Proses pengadaan barang/jasa melalui e-Purchasing
21	CDK Wilayah Barat	Hubungan afiliasi	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pengawasan, Kepala Seksi Konservasi, Rehabilitasi dan Wilayah Pesisir, dan Petugas Penyedia Barang dan Jasa	Barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang diusulkan	adanya hubungan afiliasi atau kedekatan objektif dengan pemilihan penyedia	Melakukan pengadaan melalui SPSE agar transparan dan sesuai prosedur yang berlaku

22	CDK Wilayah Barat	Gratifikasi	Petugas pelayanan perizinan	Pemberian gratifikasi kepada petugas pelayanan agar perizinan lebih cepat terbit atau perizinan terbit walaupun tidak memenuhi persyaratan	pelaku usaha ingin mendapat kemudahan dalam pengajuan perijinan berusaha	Sosialisasi Perizinan Berusaha, Menerima berkas perijinan melalui OSS
23	CDK Wilayah Barat	Gratifikasi	Kepala dan Staf Seksi Pengawasan	Pemberian gratifikasi kepada Petugas Pengawasan saat melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha KP	"damai" agar kasus tidak berproses lebih lanjut	Prosedur pengawasan yang akuntable dan analisis hasil / laporan hasil pengawawasn oleh tim / atasan pengawas perikanan
24	CDK SELATAN	Hubungan Afiliasi	Kepala dan Staf Seksi Konservasi, Rehabilitasi dan Perizinan dan Penyedia Barang jasa	Barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang diusulkan	Adanya hubungan afiliasi dengan penyedia barang/jasa	Proses pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan secara profesional sesuai prosedur yang berlaku
25	CDK SELATAN	Gratifikasi	Petugas yang melaksanakan pelayanan perizinan	Pemberian gratifikasi kepada petugas saat melaksanakan pelayanan dan verifikasi dengan harapan perizinan dapat lebih cepat terbit	Ketidakpahaman pemohon perizinan terkait peraturan gratifikasi	1. Sosialisasi terkait benturan kepentingan 2. Penguatan nilai-nilai integritas yang disisipkan dalam forum-forum 3. Evaluasi dan pengendalian internal 4. Dokumen Surat Perintah Tugas (SPT) Perjalanan Dinas tercantum perintah tidak menerima gratifikasi

26	CDK SELATAN	Gratifikasi	Pengawas Perikanan	Pemberian gratifikasi kepada petugas saat melaksanakan pengawasan pelaku usaha dan patroli kapal perikanan	Ketidakpahaman pelaku usaha pada aturan perundang-undangan yang berlaku	1. Sosialisasi/edukasi terkait aturan perundangan 2. Penguatan nilai-nilai integritas yang disisipkan dalam forum-forum 3. Evaluasi dan pengendalian internal 4. Dokumen Surat Perintah Tugas (SPT) Perjalanan Dinas tercantum perintah tidak menerima gratifikasi
27	CDK TIMUR	Hubungan Afiliasi	Kepala dan Staf Seksi Konservasi, Rehabilitasi dan Perizinan dan Penyedia Barang / Jasa	Barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang diusulkan	Adanya hubungan afiliasi / kedekatan dengan penyedia barang / jasa	Proses pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan secara profesional sesuai prosedur yang berlaku
28	CDK TIMUR	Kelemahan Sistem Organisasi	Kepala dan Staf Seksi Konservasi, Rehabilitasi dan Perizinan	Terdapat beberapa kelompok masyarakat mangrove yang berada pada satu lokasi	Adanya perbedaan pandangan	Melakukan koordinasi dengan penyuluh di sekitar lokasi
29	CDK TIMUR	Gratifikasi	Petugas yang melaksanakan pelayanan perizinan	Pemberian gratifikasi kepada petugas saat melaksanakan pelayanan dan verifikasi dengan harapan perizinan dapat lebih cepat terbit	Ketidakpahaman pemohon perizinan terkait peraturan gratifikasi	1. Sosialisasi terkait benturan kepentingan 2. Penguatan nilai-nilai integritas yang disisipkan dalam forum-forum 3. Evaluasi dan pengendalian internal 4. Dokumen Surat Perintah Tugas (SPT) Perjalanan Dinas

							tercantum perintah tidak menerima gratifikasi
30	CDK TIMUR	Gratifikasi	Pengawas Perikanan	Pemberian gratifikasi kepada petugas saat melaksanakan pengawasan pelaku usaha dan patroli kapal perikanan	Ketidakpahaman pelaku usaha pada aturan perundang-undangan yang berlaku	1. Sosialisasi terkait aturan perundangan 2. Penguatan nilai-nilai integritas yang disisipkan dalam forum-forum 3. Evaluasi dan pengendalian internal	
31	CDK TIMUR	Kelemahan Sistem Organisasi	Kepala dan Staf Seksi Pengawasan	Terjadi overlapping kegiatan antara Seksi Pengawasan dan Bidang PSDKP	Objek pengawasan dan wilayah kerja yang sama	Sinkronisasi kegiatan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengawasan	
32	BBIAPL	Hubungan afiliasi	Kepala BBIAPL	Pemilihan/ penunjukan penyedia jasa yang tidak kompeten	Adanya pertemuan antara pemilik pekerjaan dan penyedia jasa	Pemilihan/ penunjukan jasa sesuai dengan aturan sehingga penyalahgunaan wewenang dapat di minimalisir serta melakukan movev pengadaan barang dan jasa secara berkala	
33	BBIAPL	Hubungan afiliasi	Kepala BBIAPL	Pemilihan/ penunjukan penyedia jasa yang tidak kompeten	Adanya pertemuan antara pemilik pekerjaan dan penyedia jasa	Pemilihan/ penunjukan jasa sesuai dengan aturan sehingga penyalahgunaan wewenang dapat di minimalisir serta	

						melakukan money pengadaan barang dan jasa secara berkala
34	BBIAPL	Hubungan afiliasi	Kepala BBIAPL	Pemilihan/ penunjukan penyedia jasa yang tidak kompeten	Harga calon induk yang ditawarkan penyedia jasa lebih tinggi dari harga pasar	Pemilihan/ penunjukan jasa sesuai dengan aturan sehingga penyalahgunaan wewenang dapat di minimalisir serta melakukan money pengadaan barang dan jasa secara berkala
35	BLPKIL	Hubungan Afiliasi	Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan BLPKIL	Penyedia dan pejabat pengadaan saling mengintervensi terkait spek barang	Proses pengadaan barang dan jasa tidak melalui pencatatan	Menerapkan SOP pengadaan barang jasa
36	BLPKIL	Hubungan Afiliasi	Penjamin mutu, Sub Koordinator Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan, Penyelia, Analis, dan petugas Penerima Sampel	Intervensi terhadap hasil uji oleh pelanggan	Keinginan pelanggan untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan untuk kepentingan tertentu	Meningkatkan kepatuhan petugas laboratorium terhadap SOP dan menerapkan sistem jaminan mutu ISO/IEC 17025:2017 dengan baik.
37	BPMHP Kelas A	Hubungan Afiliasi	petugas pengadaan barang	Barang / Jasa yang diterima tidak sesuai spesifikasi pengusulan	keakraban dengan penyedia barang dan jasa	spesifikasi barang / jasa harus diverifikasi oleh pengguna barang / jasa serta dilakukan audit internal secara berkala

38	BPMHP Kelas A	Hubungan Afiliasi	petugas pelayanan pelanggan, kepala sub bagian tata usaha	Merubah hasil uji yang terdapat laporan hasil pengujian (CAT)	keakraban dengan pelanggan	Laporan Hasil Pengujian (CAT) diverifikasi oleh penyelia dan penanggung jawab teknis pengujian sebelum ditandatangani Kepala BPMHP
39	BPMHP Kelas A	Gratifikasi	Tim Audit GMP - SSOP dan Evaluator produk	Pemberian gratifikasi pada saat melaksanakan kegiatan pembinaan pra-SKP dan sertifikasi SPPT SNI oleh pelaku usaha dengan harapan hasil pembinaan / sertifikasi dianggap sesuai / memenuhi	keakraban pelaku usaha dengan personel yang melakukan kegiatan	Melakukan pergantian / rotasi personel agar tidak melakukan kegiatan secara berturut - turut pada pelaku usaha yang sama
40	PPP Morodemak	Hubungan Afiliasi	Kepala PPP Morodemak	Pengelolaan Kawasan Pelabuhan Banyaknya penyewa lahan dan penyewa kios di kawasan PPP Morodemak yang tidak tepat pada saat pembayaran sewa lahan dan kios sehingga untuk menambah PAD Pelabuhan masih belum maksimal	Kurang memudahinya sarana dan prasarana di kawasan pelabuhan akibat kawasan pelabuhan yang terendam banjir ROB, Lahan penjemuran yang di sewa penyewa lahan terendam banjir ROB dan kios-kios untuk para pedagang yang sekarang sudah terendam ROB	Melaksanakan perbaikan fasilitas pokok fasilitas fungsional atau fasilitas penunjang Leveling Kawasan guna memberi kenyamanan kepada para pelaku usaha perikanan dan penyewa lahan serta penyewa kios di kawasan PPP Morodemak.

41	PPP Morodemak	Hubungan Afiliasi	Nelayan Masyarakat Pengguna Kawasan, Kepala PPP Morodemak	Pelayanan kepada nelayan di kawasan PPP Morodemak tidak berjalan dengan baik	Akibat kantor pelayanan di PPP Morodemak terendam air ROB banyak nya fasilitas pelayanan publik yang sudah rusak akibat terendam air ROB,jalan untuk menuju kantor terendam ROB kurang maksimalnya pelayanan kepada nelayan akibat kurangnya perangkat komputer dan printer	Memperbaiki fasilitas pokok fasilitas fungsional atau fasilitas penunjang guna memperlancar pelaksanaan kepada masyarakat dan nelayan di kawasan PPP Morodemak
42	PPP Morodemak	Kepentingan Pribadi	Masyarakat dan pengguna lahan di kawasan PPP Morodemak,kepala PPP Morodemak	Aktifitas pelayanan kepelabuhanan terhambat akibat banyak oknum yang tidak bertanggung jawab	Banyak penyewa lahan yang melakukan penjemuran ikan di sepanjang jalan menuju kawasan pelabuhan serta banyak jaring milik beberapa pemilik kapal yang di biarkan begitu saja di lokasi kawasan PPP Morodemak yang berakibat terganggunya mobilitas pengangkutan ikan hasil tangkapan nelayan yang akan keluar dan masuk pelabuhan	Melaksanakan monitoring kawasan pelabuhan guna memberikan himbauan kepada para pelaku usaha perikanan yang beraktifitas di seluruh kawasan PPP Morodemak untuk tidak mementingkan kepentingan pribadi serta menertibkan kawasan pelabuhan PPP Morodemak

43	PPP Tasikagung	Gratifikasi	- Kepala UPT - Petugas pelayanan	Pelaku usaha menginginkan pelayanan yang lebih cepat tanpa melalui prosedur yang berlaku	Integritas pegawai rendah	1. Melakukan pembinaan secara rutin
44	PPP Tasikagung					2. Melakukan roling petugas setiap periode tertentu
45	PPP Tasikagung	hubungan afiliasi	Pejabat Pembuat Komitmen	pemilihan penyedia barang/jasa tidak sesuai spesifikasi	hubungan pertemanan	Proses pemilihan penyedia barang/jasa secara profesional sesuai prosedur (Perpres 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang penyedia dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah)
46	PPP Tasikagung	Gratifikasi	Pejabat pengadaan	Penyedia jasa menginginkan mendapatkan proyek penyediaan barang/jasa	Integritas pegawai rendah	Proses pemilihan penyedia barang/jasa secara profesional sesuai prosedur (Perpres 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang penyedia dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah)
47	PPP Tasikagung	Kelemahan sistem organisasi	Kepala UPT	Tidak adanya penindakan atas indisipliner yang dilakukan pegawai	Adanya hubungan kekerabatan	Pembinaan terhadap seluruh pegawai

48	PPP ASEMDOYONG	Hubungan Afiliasi	Kepala PPP Asemdayong	Pengelolaan Kawasan: Pelabuhan Tidak Berjalan dengan Baik dan Nyaman	Kurang optimalnya penarikan reribusi pas masuk kawasan pelabuhan	Memperbaiki Sarana Pas masuk Kawasan PPP Asemdayong
49	PPP ASEMDOYONG	Hubungan Afiliasi	Masyarakat Pengguna Kawasan, Kepala PPP Asemdayong	Pelayanan kepada masyarakat kawasan PPP Asemdayong tidak berjalan dengan baik	Tidak Tersedia Fasilitas Sarana Kebersihan di PPP Asemdayong secara memadai	Memperbaiki Fasilitas Sarana Kebersihan (MCK) di Kawasan PPP Asemdayong
50	PPP ASEMDOYONG	Hubungan Afiliasi	Pengguna Kawasan, Kepala PPP Asemdayong	Pengguna kawasan / Pelaku usaha tidak memiliki sumber air bersih yang cukup. Masyarakat pengguna kawasan kesulitan untuk mendapatkan sarana kebersihan (Mandi, BAK, BAB)	Tidak Tersedia Fasilitas Sumber Air Bersih yang memadai bagi para pelaku usaha kawasan PPP Asemdayong	Pembuatan Sumur Bor Sederhana di Sekitar Kawasan Usaha
51	PPP ASEMDOYONG	Hubungan Afiliasi	Pengguna Kawasan, Kepala PPP Asemdayong	Tempat pengolahan ikan tidak layak untuk kegiatan komersial	Kerusakan parah beberapa kios pengolahan ikan	Melakukan perbaikan beberapa pintu kios pengolahan ikan
52	PPP ASEMDOYONG	Kelemahan Sistem Organisasi	Kepala PPP Asemdayong	Tidak tertatanya parkir kendaraan di Kantor PPP Asemdayong	Terbatasnya Tempat Parkir untuk Karyawan	Mengusulkan anggaran Fasilitas Tempat Parkir Karyawan ke DKP Jateng
53	PPP ASEMDOYONG	Kelemahan Sistem Organisasi	Kepala PPP Asemdayong	Eksistensi kantor PPP Asemdayong kurang dikenal masyarakat	Tidak Tersedia Informasi Kantor Pelabuhan Secara Memadai	Mengajukan anggaran Perbaikan Papan Nama Kantor ke DKP Jateng

54	PPP Tawang	Hubungan Afiliasi	Petugas Kebersihan, Petugas TPI, Bakul Ikan	Penanganan sampah di TPI	Sampah ikan tidak ditangani dengan baik sehingga menimbulkan bau tidak sedap	Dilakukan pembersihan bersama dan menyediakan kontainer sampah yang layak digunakan
55	PPP Tawang	Kelemahan sistem organisasi	Kepala Pelabuhan, Pegawai	Tidak ada penindakan tegas atas indisipliner yang dilakukan SDM	Belum sepenuhnya penggunaan absensi digital	Pembinaan terhadap SDM dan perencanaan penyediaan absensi digital
56	PPP Tawang	Hubungan Afiliasi	Kepala PPP Tawang, Petugas Penata Kawasan, TNI AL, TPI, SPBN	Penataan kawasan menjadi tanggung jawab PPP Tawang	Stakeholder beranggapan karena berada di wilayah PPP Tawang, maka semua masalah yang muncul harus diselesaikan oleh PPP Tawang	Koordinasi stakeholder dan kegiatan money penataan kawasan
57	PPP Larangan	Kelemahan Sistem Organisasi	Kepala PPP Larangan, Pembantu Bendahara Penerimaan Pembantu, Petugas Pemungut Retribusi	Pemungutan retribusi pas masuk kurang optimal karena belum ada portal pas masuk di PPP Larangan	Keterbatasan anggaran untuk membangun portal pas masuk dan pintu gerbang	Pengajuan dan pengadaan portal pas masuk dan pintu gerbang
58	PPP Larangan	Kelemahan Sistem Organisasi	Pejabat Pembuat Komitmen	Proses pengajuan dan pengesahan SPJ yang membutuhkan waktu lebih lama	Karena posisi Pejabat Pembuat Komitmen yang tidak berada dalam 1 kantor sehingga menghambat dalam lamanya proses pengajuan dan pengesahan SPJ	Penyesuaian pelaksanaan proses pengajuan dan pengesahan SPJ dengan kesediaan waktu dari Pejabat Pembuat Komitmen

59	PPP Larangan	Perangkapan Jabatan	Pegawai ASN dan Non ASN di PPP Larangan	Pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan jabatan dari SDM yang bersangkutan	Kurangnya jumlah pegawai yang sesuai kompetensinya dengan tugas pokok dan fungsi yang ada di PPP Larangan	Pengajuan Penambahan SDM dari PNS maupun PPPK
60	PPP Larangan	Hubungan afiliasi	Kepala PPP Larangan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Pemilihan penyedia barang/jasa dari orang yang sudah dikenal	Karena merasa jika penyedia barang/jasa dilakukan oleh orang yang dikenal, maka kegiatan penyediaan akan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan dan hasilnya bagus secara mutu dan kualitas	Proses pemilihan pengadaan langsung sesuai kompetensi, komitmen dan kemampuan dari penyedia
61	PPP Larangan	Hubungan Afiliasi	Kepala PPP Larangan, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu	Barang/jasa yang diterima tidak sesuai spesifikasi pengusulan	Ketersediaan barang / jasa di penyedia belum tersedia atau harus inden	Spesifikasi barang / jasa harus dilakukan secara profesional sesuai prosedur dan diverifikasi oleh pengguna barang / jasa serta dipastikan ketersediaan barang / jasa yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan
62	PPP Larangan	Gratifikasi	Kepala PPP Larangan, Petugas Pelayanan	Kepala PPP Larangan/Petugas Pelayanan menerima gratifikasi dari pengguna jasa pelabuhan	Pengguna jasa pelabuhan merasa hutang budi sehingga memberikan sesuatu sebagai ucapan terima kasih atas layanan yang diberikan	Meningkatkan integritas pegawai dengan tidak pernah meminta dan mengharapakan apapun dalam bentuk imbalan baik itu uang, barang atau jasa dari pengguna jasa

63	PPP TEGALSARI	Hubungan Afiliasi	KPA, PPTK, Penyedia Barang/Jasa	Pemilihan penyedia barang/jasa tidak sesuai spesifikasi	Adanya hubungan pertemanan	Proses pemilihan penyedia barang/jasa secara profesional sesuai prosedur yang telah ditentukan
64	PPP TEGALSARI	Gratifikasi	Kepala PPP, Petugas pelayanan perijinan berusaha	Penerimaan gratifikasi dalam pelayanan dokumen perijinan berusaha kapal perikanan	penerima layanan merasa harus berterima kasih karena telah dibantu	Tidak meminta imbalan kepada penerima layanan, Evaluasi dan pengendalian internal yang berjenjang
65	PPP TEGALSARI	Kelemahan Sistem Organisasi	Kepala PPP, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan	Kapal Perikanan tidak tertib saat sandar di dermaga, menyebabkan kemacetan alur pelayanan terutama saat ramadhan/menjelang idul fitri	Belum adanya petugas kesyahbandaran lapangan yang memantau langsung ketertiban kapal perikanan selama 24 jam, karena keterbatasan jumlah pegawai	Berkoordinasi dengan Tim Kamladu Tegalsari (Satpolairud Polresta Tegal, Lanal Tegal)
66	PPP TEGALSARI	Kelemahan Sistem Organisasi	Kepala PPP Tegalsari	Tidak tertatanya parkir kendaraan di Kantor PPP Tegalsari	Tempat parkir tersedia tetapi bangunan sudah mengalami kerusakan	Mengusulkan anggaran Fasilitas Tempat Parkir Karyawan ke DKP Jateng
67	PPP TEGALSARI	Gratifikasi	Kepala PPP, Petugas Pelayanan	Kepala PPP Tegalsari/Petugas Pelayanan menerima gratifikasi dari pengguna jasa pelabuhan	Pengguna jasa pelabuhan merasa hutang budi sehingga memberikan sesuatu sebagai ucapan terima kasih atas layanan yang diberikan	Meningkatkan integritas pegawai dengan tidak pernah meminta dan mengharapkan apapun dalam bentuk imbalan baik itu uang, barang atau jasa dari pengguna jasa

68	PPP TEGALSARI	Akses khusus kepada pihak tertentu	Kepala PPP, Petugas pelayanan retribusi	Memberikan alokasi sewa lahan/kios kepada orang tertentu tanpa mekanisme yang benar	hubungan pertemanan dengan pihak tertentu sehingga mempengaruhi keputusan	Pemberian pemahaman tentang mekanisme yang benar dalam perjanjian sewa lahan, Evaluasi dan pengendalian internal yang berjenjang
69	PPP TEGALSARI	Hubungan Afiliasi	Petugas Kebersihan, Petugas TPI, Bakul Ikan	Penanganan sampah di TPI	Sampah ikan tidak ditangani dengan baik sehingga menimbulkan bau tidak sedap	Dilakukan pembersihan bersama dan menyediakan kontainer sampah yang layak digunakan
70	PPP Klidang Lor	Gratifikasi	Kepala PPP Klidang Lor, Petugas Pelayanan	Petugas Pelayanan menerima gratifikasi dari Pelaku Usaha Perikanan	Pelaku Usaha Perikanan merasa perlu memberikan sesuatu seperti uang, makanan atau barang yang lain sebagai ucapan terima kasih atas layanan yang diberikan	Tidak menerima apapun dari pelaku usaha perikanan kecuali dokumen yang dibutuhkan dalam pelayanan, seluruh pelayanan pembayaran dilaksanakan di ruang pelayanan kantor PPP Klidang Lor
71	PPP Klidang Lor	Hubungan afiliasi	Kepala PPP Klidang Lor dengan Penyewa Lahan	keterlambatan pembayaran sewa	pendapatan usaha menurun	pembayaran dilakukan sesuai dengan perjanjian sewa lahan
72	PPP Lohgending	Kepentingan Pribadi	Kepala PPP, Petugas pelayanan retribusi	Pemberian alokasi sewa lahan/bangunan kepada pihak tertentu tanpa prosedur (SOP) yang benar dan sesuai	hubungan personal/keluarga dengan pihak tertentu sehingga mempengaruhi keputusan	Memberikan penjelasan/sosialisasi terkait alur dan mekanisme perjanjian sewa lahan dan atau bangunan, Evaluasi dan pengendalian internal yang berjenjang
73	PPP Lohgending	Hubungan afiliasi	Kepala PPP, Petugas pelayanan retribusi	Pembayaran kios yang tertunda	hubungan personal/keluarga dengan pihak tertentu sehingga mempengaruhi keputusan	Penjelasan kepada penyewa terkait mekanisme yang benar dalam perjanjian sewa lahan dan isi dari Surat Perjanjian Sewa yang sudah disepakati

74	PPP Lohgending	Gratifikasi	Kepala PPP, Petugas pelayanan retribusi	Pemberian gratifikasi saat pembayaran retribusi sewa lahan / bangunan	penerima layanan merasa harus berterima kasih karena telah dibantu	Tidak meminta imbalan kepada para penyewa lahan/bangunan, seluruh pelayanan pembayaran retribusi dilaksanakan di ruang pelayanan kantor pelabuhan
75	PPP Lohgending	Gratifikasi	Kepala PPP, Petugas pelayanan perijinan berusaha	Penerimaan gratifikasi dalam pelayanan dokumen perijinan berusaha kapal perikanan	penerima layanan merasa harus berterima kasih karena telah dibantu	Tidak meminta imbalan kepada penerima layanan, Evaluasi dan pengendalian internal yang berjenjang
76	PPP Lohgending	Hubungan Afiliasi	KPA, PPTK, Penyedia Barang/Jasa	Pemilihan penyedia barang/jasa tidak sesuai spesifikasi	Adanya hubungan pertemanan	Proses pemilihan penyedia barang/jasa secara profesional sesuai prosedur yang telah ditentukan
77	PPP Lohgending	Gratifikasi	KPA, PPTK, Penyedia Barang/Jasa	Pemberian gratifikasi saat pelaksanaan pemilihan penyedia barang jasa	Penyedia mengharapkan menjadi pelaksana barang jasa akan tetapi tidak mau mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku	bertindak secara profesional dengan mengutamakan integritas

78	PPP Bajomulyo	PPP Wonokerto	Kepala PPP Bajomulyo, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan	PPP Bajomulyo tidak dapat menangani masalah kapal perikanan mangkrak di Sepanjang Alur Sungai Silugonggo (Wilayah Pengoperasian Perairan PPP Bajomulyo) yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas Sungai dan berpotensi menimbulkan banjir apabila curah hujan tinggi	Karena belum ada Peraturan Gubernur maupun Peraturan Kementerian Kelautan terkait juknis penanganan kapal perikanan mangkrak	Sudah berkoordinasi dengan BBWS Pemali Juwana selaku instansi yang berwenang dalam pengelolaan badan air Sungai Silugonggo dan DJPT KKP, namun belum ditemukan solusi yang dapat direalisasikan
79	PPP Bajomulyo	Kelemahan Sistem Organisasi	Kepala PPP Bajomulyo	Terdapat pelaku usaha di kawasan TPI Juwana Unit 1 yang mendirikan bangunan tanpa izin	Kepatuhan dan kesadaran terhadap hukum pelaku usaha yang lemah, pihak TPI Juwana Unit 1 dan PPP Bajomulyo menghindari gesekan dengan masyarakat untuk menjaga keharmonisan di lingkungan Pelabuhan Perikanan	Pendekatan persuasif secara bertahap

80	PPP Bajomulyo	Kelemahan Sistem Organisasi	Kepala PPP Bajomulyo, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan	Kapal Perikanan tidak tertib saat sandar di dermaga, menyebabkan kemacetan alur pelayaran terutama saat ramadhan/menjelang idul fitri	Belum adanya petugas kesyahbandaran lapangan yang memantau langsung ketertiban kapal perikanan selama 24 jam, karena keterbatasan jumlah pegawai	Berkoordinasi dengan Tim Terpadu Maritim Juwana (Satpolairud Polresta Pati, Pos TNI AL Juwana, UPP Kelas III Juwana dan TPI Juwana Unit 2
81	PPP Karimunjawa	Gratifikasi	Petugas pelayanan, Kepala tata Usaha, kepala PPP Karimunjawa	Hubungan pertemanan	Plaku usaha ingin perizinan dokumen berlayar yang diajukan lebih cepat diterbitkan terbit	Seluruh proses pengajuan dan verifikasi dokumen harus dilakukan melalui aplikasi DJPT Integrasi dan sesuai prosedur
82	PPP Karimunjawa	Kepentingan Pribadi	Petugas pelayanan, Kepala tata Usaha, kepala PPP Karimunjawa	Penyewa memberikan alokasi sewa lahan kepada orang lain secara ilegal / tanpa melalui prosedur yang sah	Perilaku yang tamak / rakus serta etika moral yang lemah	Pembinaan dan pemahaman tentang mekanisme yang benar dalam perjanjian sewa lahan
83	PPP Karimunjawa	Gratifikasi	Petugas pelayanan, Kepala tata Usaha, kepala PPP Karimunjawa	Melakukan fasilitasi dalam pengurusan dokumen perizinan kapal perikanan	Kurangnya pengetahuan nelayan, nelayan malas berurusan dengan sistem birokrasi	Selalu melakukan pembinaan kepada petugas pelayanan terkait integritas dan pengawasan internal setiap bulan
84	PPP Wonokerto	Hubungan Afiliasi	KPA, PPTK, Penyedia Barang/Jasa	Pemilihan penyedia barang/jasa tidak sesuai spesifikasi	Adanya hubungan pertemanan	Proses pemilihan penyedia barang/jasa secara profesional sesuai prosedur yang telah ditentukan

85	ppp Wonokerto	Gratifikasi	Kepala PPP, Petugas pelayanan	Penerimaan gratifikasi dalam pelayanan dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB)	Perilaku individu atau personil yang tamak / rakus serta moral yang lemah, penerima layanan merasa harus berterima kasih	Tidak meminta imbalan kepada penerima layanan, Evaluasi dan pengendalian internal yang berjenjang
86	ppp Wonokerto	Akses khusus kepada pihak tertentu	Kepala PPP, Petugas pelayanan retribusi	Memberikan alokasi sewa lahan/kios kepada orang tertentu tanpa mekanisme yang benar	hubungan pertemanan dengan pihak tertentu sehingga mempengaruhi keputusan	Pemberian pemahaman tentang mekanisme yang benar dalam perjanjian sewa lahan, Evaluasi dan pengendalian internal yang berjenjang
87	ppp Wonokerto	Gratifikasi	KPA, PPTK, Penyedia Barang/Jasa	Pemberian gratifikasi saat pelaksanaan pemilihan penyedia barang jasa	Penyedia mengharapkan menjadi pelaksana barang jasa akan tetapi tidak mau mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku	bertindak secara profesional dengan mengutamakan integritas dan meminta pendampingan dari APIP
88	PPP Wonokerto	Hubungan afiliasi	Kepala PPP, Petugas pelayanan	Pembuatan surat rekomendasi BBM	hubungan pertemanan dengan pihak tertentu sehingga mempengaruhi keputusan	Pembuatan surat rekomendasi BBM dilakukan sesuai dengan SOP, serta dilakukan verifikasi berkas permohonan rekom
89	ppp Wonokerto	Hubungan afiliasi	Kepala PPP, Petugas pelayanan retribusi	Pembayaran kios yang tertunda	hubungan pertemanan dengan pihak tertentu sehingga mempengaruhi keputusan	Pemberian pemahaman tentang mekanisme yang benar dalam perjanjian sewa lahan, Surat Perjanjian Sewa yang sudah disepakati (PKS)